

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di zaman globalisasi yang kita lihat saat ini, kompetisi di bidang ekonomi sangatlah kuat. Setiap individu saling berlomba untuk memenuhi perekonomiannya dengan selalu mengikuti perubahan yang terjadi, bahkan Pemerintah Indonesia mulai berbenah untuk melakukan peningkatan pembangunan dalam bidang perekonomian dengan menyiapkan segala ide-ide usaha yang akan dijalankan. Pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia, selain melalui perusahaan-perusahaan besar yang berada di Indonesia pemerintah juga mengembangkan perekonomian melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM). Usaha mikro kecil menengah sendiri dianggap mampu bertahan dalam situasi seperti apapun dan mereka juga dianggap sebagai salah satu yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dalam negeri untuk mengembangkan dunia ekonomi dan industri dalam negeri.

Perkembangan usaha kecil mikro menengah menjadi salah satu sarana aktivitas masyarakat dalam menyediakan penghasilan, tenaga kerja dan mempunyai kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Perkembangan UMKM dapat kita lihat dari data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di

Indonesia. Bahkan UMKM mempunyai daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. UMKM juga sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,015 dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37%.<sup>2</sup>

Koperasi sendiri merupakan bagian dari UMKM, namun tetap melakukan pencatatan akuntansi didalamnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya harus senantiasa mensejahterakan dan mendorong anggotanya untuk terus maju sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Koperasi sendiri mengangkat azas kekeluargaan, yang bermakna koperasi bertujuan tidak hanya dipergunakan menguntungkan disebelah pihak saja, tetapi saling menguntungkan seluruh anggotanya. Hal ini lah yang membedakan koperasi dengan usaha yang lain. Dijelaskan dalam UU NO.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi digunakan sebagai penggerak entitas ekonomi dan komersial rakyat, serta berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Kekayaan Negara, Artikel DJKN. “UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Indonesia-Terungkit.html>, diakses pada 16 Mei 2021.

demi kesejahteraan rakyat. Selain asas kekeluargaan, koperasi menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Koperasi yang digadang-gadang mampu menjadi soko guru perekonomian nasional yang diharapkan koperasi mampu menjadi pilar, penyangga utama ataupun tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak kekurangan yang dihadapi koperasi, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya modal yang meliputi modal akses kredit yang tidak merata maupun adanya pembatasan kredit, perencanaan, administrasi dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, akuntansi berperan untuk memberikan perbaikan dalam bidang manajerial.

Pembangunan koperasi adalah tugas serta pertanggung jawaban Pemerintah maupun seluruh rakyat itu salah satu poin yang terdapat dalam undang-undang perkoperasian. Bahkan, dalam perkembangan awal koperasi di pandang sebelah mata. Saat ini koperasi sudah masuk ke daerah-daerah Indonesia, tidak hanya terdapat di kota. Seperti halnya terdapat di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur jumlah koperasi berkembang sangat baik. Dapat kita lihat tabel dibawah ini di Kabupaten Tulungagung, koperasi berkembang dengan baik terdapat 961 koperasi dari berbagai jenis koperasi yang sudah berbadan hukum di Tulungagung. Dapat kita lihat bahwa koperasi secara tidak langsung akan membantu perekonomian masyarakat sekitar, melalui peminjaman modal usaha, bimbingan pelatihan usaha dan masih banyak lagi produk saat ini.

**Tabel 1.1**  
**Koperasi yang Berbadan Hukum Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018<sup>3</sup>**

No.	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi
1	Koperasi Pegawai Negeri	58
2	Koperasi Angkatan Darat	1
3	Koperasi kepolisian	1
4	Koperasi Pensiun ABRI/Veteran	1
5	Koperasi Simpan Pinjam	28
6	Koperasi Perikanan	2
7	Koperasi Pasar (KOPPAS)	7
8	Koperasi Unit Desa (KUD)	20
9	Koperasi Pertanian	31
10	Koperasi SerbaUsaha (KSU)	126
11	Koperasi Wanita Non Pegawai	18
12	Koperasi Wanita	287
13	Koperasi Peternakan	1
14	Koperasi Profesi	4
15	Koperasi Karyawan	18
16	KSPPS (KSP Pembiayaan Syariah)	160
17	Konprinka	5
18	Koptil	1
19	Koperasi Pedagang Kaki Lima (PK5)	4
20	Koppontren	28
21	Koperasi Pertambangan	2
22	Kop.Perikanan	22
23	Wredatama	10
24	Kop.Masyarakatf Desa Hutan	38
25	Kop.Mahasiswa	1
26	Kop.Pemuda	3
27	Koperasi Perumahan	0
28	Koperasi Angkatan Darat	2
29	Koperasi Lainnya	96
30	Koperasi Sekunder	6
Jumlah		961

Muhammad Khafid, dkk. menurutnya melalui pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan benar dan professional, agar tujuan-tujuan koperasi itu

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, April. "Koperasi Yang Berbadan Hukum Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018" dalam <https://tulungagung.bps.go.id/staticable/2018/04/16/1992/koperasi-yang-berbadan-hukum-menurut-jenis-koperasi-dan-permodalan-di-kabupaten-di-kabupaten-tulungagung-2017.html> pada tanggal 28 September 2020.

sendiri dapat tercapai. Pengelolaan keuangan yang benar dilakukan oleh koperasi dapat digunakan sebagai tolak ukur koperasi yang sehat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga ekonomi seperti koperasi, masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi,<sup>4</sup> seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ بَيْنَ لَمَّا جَلِمْتُمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتِّبِئُوا  
عِدَّتَكُمْ يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ بِهَا عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُوا لِيُحْمِلُوا لَكُمْ  
بُحْرَانًا يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ بِهَا عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعَ عَلَيْكُمْ  
فَلْيَكْتُبُوا لِيُحْمِلُوا لَكُمْ بُحْرَانًا يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ بِهَا عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا  
يَسْتَطِيعَ عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا عِدَّتَكُمْ يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ بِهَا عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ  
اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ لَكَ حَتَّى تَقْرَأَ  
بِهِمْ أَوْ يَكْتُبُوكَ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَأَنْتُمْ حَاظِرُونَ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ  
وَأَنْتُمْ حَاظِرُونَ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ  
بِهِمْ عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ  
لَكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِهِمْ أَوْ يَكْتُبُوكَ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَأَنْتُمْ حَاظِرُونَ وَأَنْتُمْ  
سَامِعُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تَدَايَنْتُمْ بِهِمْ عِلْمَ مَا عِلَّمَهُ اللَّهُ

#### Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)

<sup>4</sup> Kadek Arsani dan I Wayan Putra, "Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP TAHUN 2009 dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013), hal. 119.

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah peneliti dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>5</sup>

Surat diatas dapat kita lihat bahwa setiap individu ataupun Lembaga harus melakukan pencatatan yang baik dan jujur, karena itu semua selain bentuk pertanggungjawaban manusia kepada manusia juga bentuk pertanggungjawab kepada yang diatas yaitu Allah. Pencatatn dapat melalui akuntansi, dimana akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk memuwujudkan tatakelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi. Koperasi merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2009, perlu membuat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana di perintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 wajib melaksanakan akuntansi.

PSAK merupakan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan standar penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas, tidak diberlakukannya kembali PSAK No. 27 tentang akuntansi

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

perkoperasian, hal ini dilihat pada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan bulan Juni 2012, tidak tercantumnya PSAK No. 27. Melalui surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE?Dept.1/XIII/2011 tanggal 20 Desember bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2009. Penyusunan laporan keuangan koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP Tahun 2009 dalam penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana.

Dipisahkannya SAK ETAP Tahun 2009 dengan PSAK dikarenakan PSAK mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS), yang dianggap terlalu kompleks jika diterapkan untuk usaha kecil. Melalui SAK ETAP Tahun 2009 para pelaku usaha kecil mampu menyusun laporan keuangan yang baik, karena SAK ETAP Tahun 2009 sendiri sudah disusun secara sederhana dan untuk memudahkan para pelaku usaha kecil. Laporan laba/rugi merupakan salah satu faktor yang menentukan laporan keuangan yang wajar. Laporan laba/rugi terdiri dari komponen pendapatan dan beban, yang berguna untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode.

Laporan laba/rugi terdapat pendapatan dan beban, yang merupakan komponen utamanya. Melalui laporan laba/rugi digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan. Menurut Scipper, pendapatan selalu menjadi item tunggal yang penting dalam suatu laporan keuangan. Martin mengatakan

bahwa beban menepati urutan kedua setelah pendapatan sebagai akun yang paling sering salah saji. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat investasi atau laba perusahaan. Pendapatan ialah indikator untuk pembentukan laba, oleh karena itu pendapatan seharusnya diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima oleh entitas.<sup>6</sup>

Penyajian laporan keuangan untuk pendapatan pada prinsipnya harus mempertimbangkan adanya penerapan yang sesuai dengan SAK ETAP Tahun 2009 untuk memenuhi kebutuhan akan penyusunan laporan keuangan yang tepat agar mendapatkan penilaian secara wajar. Dua konsep yang harus dipenuhi untuk mengukur kriteria pengakuan pendapatan yaitu terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi dan terbentuk atau terhak. Selanjutnya pendapatan yang telah diakui dan diukur kedalam catatan keuangan perusahaan atau laporan neraca yang kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan yang menggambarkan tingkat pencapaian yang diperoleh perusahaan dalam aktivitas produksi maupun jasa.

Perlakuan akuntansi beban juga didasarkan oleh SAK ETAP Tahun 2009 dimana pada umumnya pengukuran terhadap beban didasarkan atas harga perolehan historis. Sama dengan halnya pendapatan, setelah beban

---

<sup>6</sup> Kadek Arsani dan I Wayan Putra, "Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP TAHUN 2009 dan Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 3 Nomor 3 tahun 2013, hal. 120-121.

diakui dan dapat diukur melalui pencatatan akuntansi beban yang telah diakui dan diukur dalam catatan keuangan perusahaan atau laporan neraca yang kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan yang menggambarkan tingkat pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam aktivitas produksi maupun jasa. Oleh karena itu pengakuan pendapatan pada periode yang bersangkutan sangatlah penting untuk kewajaran laporan keuangan. Dengan dikeluarkannya aturan baru untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, maka perlu diketahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh koperasi sesuai atau tidak dengan SAK ETAP Tahun 2009. Berangkat dari latar belakang ini saya bermaksud mengangkat latar belakang ini dan mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Menghindari peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan, maka peneliti lebih memfokuskan pada objek penelitian yang diangkat merupakan salah satu manfaat dari fokus penelitian. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh di lapangan, maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian hanya di Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung serta hanya melaporkan laporan keuangan berupa

laporan laba rugi yang berkaitan dengan perlakuan pendapatan dan beban yang didasarkan pada SAK ETAP Tahun 2009 dari situasi saat ini baik dari segi perekonomian dan sosial yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan untuk lebih memfokuskan dalam penelitian, maka disusun lah pertanyaan peneltian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik tahun 2009 pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengukuran pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik tahun 2009 pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas penyajian pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik tahun 2009 pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengungkapan pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik tahun 2009 pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

5. Apakah implementasi laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public tahun 2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas pengukuran pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas penyajian pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
4. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas pengungkapan pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas

publik pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

5. Implikasinya pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan, perbandingan ataupun pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan implikasinya pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk pengembangan mata kuliah akuntansi keuangan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan dalam berbagai referensi penelitian terutama yang berkaitan dengan masalah dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan implikasi pada laporan keuangan Koperasi dan dapat dipergunakan sebagai tambahan kepustakaan yang memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada umumnya.

- b. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu memberikan bahan referensi penelitian lain yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dan implikasi pada laporan keuangan Koperasi.
- c. Bagi pihak lain, sebagai tambahan ilmu baru yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang berbasis standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik pada koperasi.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.<sup>7</sup>

#### **b. Beban**

Beban adalah penggunaan lain dari asset atau jaminan utang dalam periode tertentu untuk mengirimkan, memproduksi barang, pemberian pelayanan atau lain yang sebagainya yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Ferry Christian Ham dkk, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut PSAK No. 28 Pada PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Manado", *Jurnal Accountability*, Volume 06 Nomor 01, 2017, hal. 81.

operasi utama perusahaan yang sedang berlangsung.<sup>8</sup>

c. SAK ETAP Tahun 2009

SAK ETAP Tahun 2009 adalah standar akuntansi yang digunakan dalam entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan yang memiliki tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal salah satu contohnya yaitu pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan suatu usaha, kreditor dan Lembaga-lembaga pemeringkat kredit lainnya.<sup>9</sup>

2. Definisi Operasional

Koperasi menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) Tahun 2009 sebagai standar yang menjadi acuan dalam menyajikan laporan keuangan. Indikatornya berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang ada pada laporan keuangan yang meliputi perlakuan terhadap pendapatan dan beban. Suatu koperasi harus menyajikan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan pendapatan dan beban yang benar-benar di peroleh dan dikeluarkan oleh koperasi dalam periode tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>9</sup>Ansor, Skrispi: *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP TAHUN 2009) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hal. 4.

## **F. Sistematika Penelitian Skripsi**

Sistematika penelitian pada skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan:** Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP Tahun 2009 dan implikasinya pada laporan keuangan Koperasi Wanita Makmur Jaya Kecamatan Boyolangu. Yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.
2. **BAB II: Kajian Pustaka:** Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pendapatan, Beban, SAK ETAP Tahun 2009 dan Koperasi, konsep implementasi serta kajian pustaka, dan kerangka pemikiran.
3. **BAB III: Metode Penelitian:** Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, tahap-tahap penelitian dan sistematika penelitian.
4. **BAB IV: Hasil Penelitian:** Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dari sumber data yang menggunakan teknik pengumpulan data.
5. **BAB VI: Analisis data dan pembahasan:** Pada bab ini memuat keterkaitan antara temuan dan teori yang dikemukakan dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

6. BAB V: Penutup: Pada bab ini peneliti memberikan pernyataan singkat yang bersifat fakta tentang uraian hasilpenelitian yang dilakukan dan memberikan saran atau rekomendasi yang dibuat atas temuan penelitian yang dilakukan.